

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan pilar terpenting bagi tegaknya sebuah bangsa, bahkan bagi suatu peradaban secara umum. Melalui pendidikan, karakteristik sebuah bangsa akan tetap lestari, karena pendidikan merupakan proses transformasi seperangkat nilai, pengetahuan, dan cara hidup dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Tanpa terkecuali bagi Indonesia, pendidikan merupakan pranata yang sangat penting untuk menentukan berdaya atau tidaknya bangsa dan negara ini ke depan.

Sampai saat ini Indonesia kerap disebut sebagai Negara transisi, yakni Negara yang sedang berusaha bangkit dari cengkraman multikrisis yang menimpanya sejak pertengahan tahun 1998 silam. Hal tersebut, menarik seandainya dilihat dari kacamata seorang tokoh pendidikan asal negeri Sakura bernama Kaoru Ishikawa, yang mengemukakan bahwa semua bentuk krisis, berawal dan berakhir pada pendidikan (KPP, 2000).

Jika dirunut, peristiwa 1998 itu berawal dari krisis moneter (ekonomi), yang diindikasikan dengan turunnya kurs rupiah terhadap dolar, sehingga menyebabkan harga-harga membumbung tinggi. Akibatnya, daya beli masyarakat untuk sekedar memenuhi kebutuhan primer melemah, apalagi untuk keperluan tambahan. Kehidupan masyarakat saat itu jelas terancam.

Banyak orang mengira, bahwa krisis dapat diselesaikan dengan cara mengganti tampuk kepemimpinan nasional. Mereka, tidak hanya berbicara soal pentingnya pemimpin pengganti, tetapi masing-masing secara praktis berebut kursi panas kepemimpinan itu. Krisis ekonomi kini telah bergeser menjadi krisis politik. Setiap orang merasa berhak dan berebut untuk menjadi pemimpin pengganti penguasa yang lama. Kuran reformasi dibuka. Jaman keterbukaan dan kebebasan dimulai. Orang boleh dan bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya atas nama kebebasan. Amanat reformasi yang awalnya adalah perbaikan, tanpa terasa telah bergeser menjadi ketidakterkendalian. Lalu satu persatu persoalan tumbuh: Kerusuhan antar ras, suku, etnis, maupun agama; pertengkaran elit; korupsi; angka kejahatan dan pengangguran meningkat; serta masih banyak lagi persoalan lainnya.

Rupanya masyarakat tidak siap menghadapi angin perubahan. Kebebasan yang sejatinya adalah bentuk dari penghargaan nilai-nilai humanisme sebagai insan yang merdeka, kini menjadi bentuk ketidakterkendalian. Maka, terjadilah *sosial chaos*.

Perspektif pendidikan dapat melihat gejala ini sebagai hilangnya tiang pancang moral pada masyarakat. Mulai dari budaya elit politik yang tidak sehat, kebebasan pers yang tidak diikuti pertanggungjawaban, tumbuhnya kebencian antarsesama anak bangsa, dan seterusnya. Krisis berikutnya pun dimulai, yakni krisis ketidaksaling-percayaan satu sama lain. hal ini dapat terjadi karena masing-masing pihak tidak bisa menjaminkan dirinya sebagai manusia yang bermoral.

Jadi, ketidaksalingpercayaan ini merupakan buah dari krisis: berupa merosotnya moral bangsa.

Dalam keterkaitan itu, lembaga yang berperan melestarikan dan menjaga moralitas bangsa tak lain adalah pendidikan. Proses pendidikan adalah proses transformasi moral. Gagal dalam moralitas, itu artinya gagal dalam pendidikan. Barangkali inilah titik terang dari pernyataan Kaoru Ishikawa di atas. Bahwa, krisis bermula dari pendidikan, dan akan berakhir oleh pendidikan.

### **1. Pentingnya Pendidikan sebagai Solusi bagi Persoalan dan Peningkatan Kualitas Sebuah Bangsa**

Menurut Tafsir (69 th, Garut), dalam sebuah seminar, ia mengemukakan, bahwa ketika pecah momentum reformasi, hampir semua bidang mengalami reformasi, kecuali dalam pendidikan. Saat itu, ada reformasi politik, reformasi hukum, reformasi pers, reformasi ekonomi. Tetapi tidak ada reformasi pendidikan. Sehingga perubahan dalam bidang pendidikan baru terjadi terkemudian.

Padahal, berbicara mengenai pendidikan, itu artinya membahas soal perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pendidikan manusia akan berpengaruh terhadap dinamika sosial-budaya masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pendidikan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Banyak pendapat para tokoh, yang menyatakan bahwa pendidikan sangat berdampak terhadap peradaban manusia.

Dalam beberapa sumber (Wahidin, 2009; Tafsir, 2008; Koesoema, 2007) disebutkan bahwa sejak masa perkembangan peradaban kuno sampai munculnya

abad pencerahan (*renaissance*) di Eropa, bidang pendidikan mendapat tempat utama dan strategis dalam kehidupan bernegara. Pendidikan merupakan yang paling utama. Dalam ketiga buku itu tertuang pula beberapa pendapat para tokoh sebagaimana berikut ini.

Jean Jacques Rosseau menyebutkan, semua yang dibutuhkan dan semua kekurangan manusia, hanya akan dipenuhi melalui pendidikan. Aristoteles, filsuf dari Athena berpendapat, bahwa perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Van de venter, tokoh politik balas budi, yang menjadi tonggak awal perkembangan munculnya golongan terpelajar Indonesia juga mengatakan, Pendidikan yang diberikan kepada rakyat pribumi, akan dapat merubah nasib pribumi. Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah Pendidikan. Selanjutnya, menurut UNESCO, badan PBB yang menangani bidang pendidikan menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dari pendidikan, sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan peradaban (Wahidin, 2009; Tafsir, 2008; Koesoema, 2007).

Di sepanjang sejarah, beberapa tokoh penting telah merumuskan sasaran pendidikan. Dalam bukunya yang berjudul *Republic*, Plato, sangat menekankan pendidikan untuk mewujudkan negara idealnya. Plato mengatakan bahwa tugas pendidikan adalah membebaskan dan memperbaharui; ada pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Pembebasan dan pembaharuan itu

akan membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa, yang akan mengantarnya ke ide yang tertinggi yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan (Tafsir, 2008).

Tokoh lain adalah Aristoteles, seorang filosof besar yang tadi sudah disebut. Ia juga murid Plato. Ia mempunyai sasaran pendidikan yang mirip dengan Plato. Tetapi, Aristoteles mengaitkannya dengan tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia (www.putra-putri-indonesia.com, Oktober 2011).

Pada abad ke-14, di Eropa banyak didirikan universitas, dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Istilah universitas pada zaman itu dipakai dalam arti yang khusus, yaitu menunjuk pada kelompok-kelompok guru dan para mahasiswa. Mereka terjamin tidak dicampuri atau diganggu oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan lainnya. Universitas berdiri sebagai suatu lembaga yang bebas dari politik dan mengatasi posisi negara. Pada masa abad Pertengahan sampai Revolusi Industri muncul universitas-universitas seperti Bologna di Italia, Oxford dan Cambridge di Inggris, Heidelberg di Jerman, Universitas Paris di Prancis, Harvard, Yale, dan Columbia di AS. Institusi-institusi ini terpisah dari dunia sekuler dan sering disebut sebagai menara gading, tempat berkumpulnya kaum elit untuk mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Di kemudian hari, khususnya universitas-universitas di Amerika Serikat, memasukan mata kuliah

*engineering* (rekayasa) ke dalam kurikulum. Tetapi citra bahwa universitas untuk mencari kebenaran tetap dipelihara.

Berbeda dengan yang terjadi di Jepang. Tujuan pendidikan dibuat sinkron dengan tujuan negara; pendidikan dirancang untuk kepentingan negara. Motif dari reformasi pendidikan yang dimotori oleh arsitek pendidikan Jepang seperti Mori Arino pada era Restorasi Meiji adalah mempertahankan negara. Semua kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan diambil demi kepentingan negara. Logika sistem pendidikannya adalah demi menjamin sukses agar dapat bersaing dengan negara-negara besar lainnya; kebijaksanaan pendidikannya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kekayaan dan kekuatan negara dengan tujuan untuk menempatkan Jepang pada kedudukan yang sama tinggi dalam waktu sesingkat mungkin dengan negara-negara besar lainnya. Jadi, tujuan pendidikan di Jepang bukan untuk mencari kebenaran seperti yang terjadi di universitas-universitas tertua di Barat. Yang dipentingkan adalah hal yang berguna saja (www.putra-putri-indonesia.com, Oktober 2011).

## **2. Amanat Pendidikan dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia**

Pada pembahasan di atas telah disebutkan beberapa tujuan pendidikan yang pernah muncul dalam Sejarah. Plato sangat menekankan pendidikan untuk mewujudkan negara idealnya. Ia mengatakan bahwa tugas pendidikan adalah membebaskan dan lepas dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Aristoteles mempunyai tujuan pendidikan yang mirip dengan Plato, tetapi ia

mengaitkannya dengan tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia (*eudaimonia*). Tujuan universitas di Eropa adalah untuk mencari kebenaran. Pada era Restorasi Meiji di Jepang, tujuan pendidikan dibuat sinkron dengan tujuan Negara, pendidikan dirancang adalah untuk kepentingan negara.

Lantas, bagaimana tujuan pendidikan nasional di Negara Republik Indonesia? Dalam UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003, Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bila ditelaah, tujuan pendidikan nasional

sesuai dengan substansi Pancasila, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Selanjutnya, merujuk kepada pasal 1 UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, disebutkan bahwa, “Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat bangsa dan Negara”.

Makna dari pernyataan dalam Undang-undang tersebut mengungkapkan beberapa hal. Pertama, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Artinya, proses pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja. Bukan aktifitas yang berjalan begitu saja. Maka dari itu proses pendidikan itu harus terencana. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pendidikan.

Berikut adalah beberapa pengertian dari perencanaan pendidikan menurut para pakarnya yang termuat dalam [www. forumsejawat.wordpress.com](http://www.forumsejawat.wordpress.com); dan [www.shvoong.com](http://www.shvoong.com) (keduanya diunduh pada 18 Nopember 2011) :

Menurut Good (1959:191), perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan, menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menentukan cara yang efektif dan efisien, dalam usaha membentuk manusia agar memiliki kompetensi sosial dan individual secara maksimal. Menurut Albert Waterson (1975), perencanaan pendidikan merupakan suatu bentuk investasi

pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial.

Sedangkan menurut Yusuf Enoch, Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara. Menurut Guruge (1972) Perencanaan Pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Menurut Coombs (1982), Perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional, dengan analisis yang sistematis atas proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat. Menurut Y. Dror (1975), Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu Negara.

Menurut Endang Sunarya (2000), perencanaan pendidikan merupakan suatu proses perumusan kebijakan dan instrument sekaligus teknik penentuan prioritas. Juga merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu Negara, serta penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik, dan Negara dalam upaya mencapai tujuan maupun fungsi pendidikan. Sedangkan Koswara dan Komariah (2010:132) mendefinisikan perencanaan pendidikan secara lebih

praksis lagi sebagai proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan system pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu.

Melihat dari beragam pendapat di atas, secara sederhana Depdiknas (2006), mengartikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Kemudian, perencanaan pendidikan di Indonesia, selain dilakukan untuk menempuh tujuan besar yang termuat dalam UUD 1945 di atas, juga untuk tujuan praktis sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003, yakni perencanaan pendidikan, untuk mewujudkan suasana belajar yang mendorong peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi dirinya, berupa:

- (1) kekuatan spiritual keagamaan,
- (2) pengendalian diri,
- (3) kepribadian,
- (4) kecerdasan,
- (5) akhlak mulia,
- (6) keterampilan

Pasal tersebut kemudian menutupnya dengan kalimat “yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” Jadi, semua kapasitas pribadi peserta didik yang didapatkan dari proses belajar yang disebutkan pada enam poin

tersebut, tidak hanya untuk keperluan dirinya, tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan Negara.

Untuk mewujudkan itu semua, baik tujuan umum maupun tujuan praktis, terjadi di ruang-ruang kelas dalam bimbingan seorang guru. Sehingga guru merupakan tulang punggung pendidikan yang sangat menentukan.

### **3. Guru Sebagai Garda Depan Pendidikan**

Pada titik ini sudah dapat dikatakan bahwa untuk mengurai dan membantu mengatasi permasalahan suatu bangsa, sangat strategis jika itu dimulai dari dunia pendidikan. Persoalan pendidikan tentu bukan hanya persoalan kelas atau sekolahan, tetapi lebih besar dari itu. Namun, sekolah atau kelas merupakan miniatur dari sesuatu yang disebut dengan pendidikan itu. Memperbaiki bangsa berawal dari pendidikan, dan memperbaiki pendidikan, dimulai dari ruang-ruang kelas sekolahan.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan usaha makro sekaligus mikro. Di tingkat makro, pembenahan pendidikan terletak pada reformasi kebijakan. Sedangkan pada level mikro, perbaikan pendidikan berjalan di sekolah.

Semua unsur pendidikan harus terlibat dalam penanganan pendidikan ini. Namun, di antara unsur-unsur pendidikan yang ada, semisal kebijakan, kurikulum, pembiayaan, fasilitas, dan lain-lain, menurut penulis yang paling mempunyai peranan penting adalah guru atau tenaga pendidik.

Guru merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan. *“No teachers, no education, no education no economic and sosial development”*.

Demikian prinsip dasar yang diterapkan dalam pembangunan pendidikan di Vietnam, berdasarkan amanat bapak bangsanya Ho Chi Min (Surya, 2008).

Sehingga tidak berlebihan rasanya, sebagaimana yang sudah banyak diketahui orang, sebuah pertanyaan penting pernah terlontar dari mulut seorang Kaisar Jepang, sesaat setelah dua kota penting: Hiroshima dan Nagasaki dilumpuhkan bom atom oleh tentara sekutu pada bulan Agustus tahun 1945. Kaisar berkata, “Ada berapa jumlah guru yang tersisa? Dengan jumlah guru yang ada, Jepang akan bangkit kembali”. Kaisar sangat percaya kepada guru, untuk membangun kembali negaranya. Sekarang, di tahun 2011 ini, 66 tahun setelah pertanyaan dan pernyataan itu, siapa yang berani mengingkari kemajuan Jepang dalam berbagai bidang?

Dengan demikian, dapatlah dikatakan, jika pilar penting sebuah Negara adalah pendidikan, maka pilar penting pendidikan adalah guru. Komponen pendidikan yang paling praktis dan nyata adalah guru. Sehingga konsekuensi-logisnya, membangun kualitas suatu bangsa, itu sepadan dengan membangun kualitas pendidikan, dan membangun kualitas pendidikan itu artinya membangun kualitas para guru.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu hanya mungkin diwujudkan dengan dorongan guru yang bermutu. Guru yang bermutu dalam bahasa Undang-undang disebut sebagai guru yang profesional.

Oleh karena itu, menurut Sofyan (2009), jika pendidikan dewasa ini situasi pendidikan dianggap menurun, maka kemerosotan pendidikan tersebut bukan

diakibatkan oleh kurikulum, tetapi cenderung oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru, dimana hal ini sekaligus mengakibatkan keengganan siswa untuk mengikuti pelajaran.

Di Amerika Serikat, sebagaimana diuraikan dalam jurnal *Educational Leadership* tahun 1993, yang juga dikutip oleh Supriadi (Sofyan, 2009), bahwa untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal:

- (1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya;
- (2) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa;
- (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi;
- (4) Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya;
- (5) Guru seharusnya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi. Bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Guru yang profesional pada dasarnya ditentukan oleh *attitude*-nya yang berarti pada tataran kematangan, yang mempersyaratkan *willingness* dan *ability*, baik secara intelektual maupun pada kondisi yang prima.

#### 4. Profesionalisme Guru dan Permasalahan yang Melingkupi Guru

Konstitusi Negara Republik Indonesia, melalui UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan profesionalisme Guru. Guru profesional adalah guru yang mempunyai kesadaran penuh bahwa profesinya adalah seorang guru, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin mempertanggungjawabkan profesinya itu. Dengan demikian, guru merupakan tenaga profesi. Sebagai tenaga profesi harus memiliki kompetensi. Dan kompetensi seseorang harus memenuhi kualifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sekolah, seorang pendidik profesional seharusnya mempunyai nilai-nilai tanggung jawab, integritas, kejujuran, kemampuan sosial dan mencapai kepuasan puncak (*self esteem*) pada saat hasil belajar siswa memuaskan.

Seorang guru yang profesional, menurut Sidi (2001: 37-40), dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (*continuous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang guru dalam menjalankan tugasnya, bukan lagi *knowledge based*, tetapi lebih bersifat *competency based*, yang menekankan pada penguasaan secara optimal konsep keilmuan dan pengayaannya yang berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Dengan bekal seperti itu, seorang guru akan menggunakan model

komunikasi dua arah dalam cara mengajarnya, sehingga hal itu menciptakan suasana yang demokratis antara guru dengan murid, yang pada gilirannya, kondisi ini akan dapat menggali potensi kreativitas anak didik.

Namun, meskipun sudah disebutkan betapa pentingnya posisi guru, dan besar harapan kepada mereka untuk membangun sebuah bangsa yang maju, di lapangan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Menurut pengakuan Surya (70 tahun, Subang) dalam suatu Seminar, bahwa di daerah-daerah masih banyak ditemukan keadaan guru yang memprihatinkan. Diantaranya, banyak guru yang tidak memahami posisinya sebagai guru, sehingga Ia tidak menunjukkan karakteristik sebagaimana layaknya seorang guru. Banyak guru yang menjalankan pekerjaannya sebagai guru sebatas menjalankan rutinitas saja. Ia tidak mengikuti isu-isu terhangat dalam dunia pengajaran. Metode pengajaran yang sudah sangat berkembang ini, tidak diakses oleh para guru, sehingga cara mereka mengajar dan memperlakukan anak didik tetap saja konservatif alias kuno.

Bahkan, tidak jarang terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa guru masih menganggap hukuman fisik merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Karena guru merasa dirinya sebagai penguasa di kelas sehingga bisa melakukan cara apapun untuk menghukum siswa. Hanya sedikit guru yang bisa dikatakan mengerti secara penuh tentang psikologi anak. Hal ini membawa dampak, perlakuan guru kepada murid dengan cara yang tidak baik (Fajar, 2011).

Sudarto (2008), menyampaikan ada tiga faktor yang menjadi pemicu perlakuan kekerasan guru terhadap muridnya. Diantaranya adalah karena sistem

pendidikan negeri ini yang mengekang para tenaga pengajar dengan kesadaran naif, hanya berpatok kepada ketentuan yang telah ada, dan banyak tenaga guru yang kaku dalam pola pengajarannya. Dampaknya, ketika ditemukan siswa yang kritis dan mau berdebat, tenaga pengajar bisa saja menilai muridnya bandel atau selalu membantah, sehingga tindakannya menempuh jalan kekerasan.

Masih menurut Sudarto (2008), pemicu kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pengajar terhadap murid, juga tak terlepas dengan perkembangan teknologi dimana para siswa sudah banyak yang mempergunakan internet, sehingga dapat membaca perkembangan secara global. Sedangkan sebagian besar tenaga pengajar di negeri ini, mungkin belum tahu mengoperasikan internet. Hal itu, jelas ada pengaruhnya terhadap tenaga pengajar yang belum mampu atau ketinggalan secara teknologi dengan siswanya.

Dari hasil pengamatan dan temuan Fajar (Tempo, 2009), saat mengikuti kegiatan *lesson study* dengan MGMP, ada beberapa kelemahan guru dalam mengajar di beberapa sekolah binaannya, diantaranya adalah:

- (1) Guru tidak menggunakan RPP atau skenario pembelajaran yang seharusnya dibuat sebelum pelajaran dimulai, sehingga menyebabkan kegiatan pembelajaran tidak terarah.
- (2) Guru tidak mempersiapkan alat bantu mengajar yang sangat diperlukan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi pelajaran, sehingga siswa mengetahui secara nyata melalui benda-benda yang nyata. Dengan alat bantu ini pengetahuan tidak hanya berupa verbal, dan bisa mengatasi kesenjangan komunikasi guru dengan siswa. Kenyataannya guru tidak

membawa alat bantu mengajar sehingga yang dilakukan hanyalah ceramah, dan ceramah saja.

- (3) Guru kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Pengetahuan tentang kemampuan awal siswa diperlukan oleh guru untuk menetapkan strategi mengajar. Bahkan untuk mengajukan pertanyaanpun, sesungguhnya diperlukan pemahaman tentang kemampuan awal siswa. Dengan memahami kemampuan awal siswa ini, guru diharapkan dapat membantu siswa memperlancar proses pembelajaran yang dilakukan dan memperkecil peluang kesulitan yang dihadapi siswa. Adakalanya satu materi tertentu memerlukan prasyarat pengetahuan sebelumnya. Jika pengetahuan prasyarat ini belum dikuasai, dan guru sudah melanjutkan pada materi berikutnya, bisa dipastikan bahwa siswa akan kesulitan mengikuti pelajaran. Hal ini bisa dideteksi melalui perilaku siswa. Siswa yang tidak dapat mengikuti materi yang sedang dibahas oleh guru cenderung berperilaku "menyimpang", seperti melamun, menulis atau menggambar yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran, berbicara sendiri atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak terkait dengan isi pembelajaran (Fajar, 2009).

Hal demikian terjadi karena biasanya guru menguasai seluruh waktu kegiatan belajar mengajar dengan berbicara hanya satu arah, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya secara individu, ataupun memberikan waktu kepada siswa untuk bekerja berkelompok.

Lebih mengerikan lagi, menurut laporan hasil penelitian Sutjipto (Rismansyah, 2008) pada tahun 2005, mengemukakan bahwa 50% guru di Indonesia tidak memiliki kualitas standarisasi pendidikan nasional. Oleh karena itu Sudarminta (Rismansyah, 2008) pada tahun 2000 melaporkan pula hasil penelitian, mengenai rendahnya mutu guru, yang di antaranya ialah: (1) lemahnya penguasaan materi yang diajarkan, (2) tidak sesuainya bidang studi yang dipelajari guru dengan yang diajarkan, (3) tidak efektifnya cara pengajaran, (4) kurangnya wibawa guru di hadapan murid, dan (5) lemahnya motivasi dan dedikasi.

Hal tersebut barangkali bisa dipahami, salah satunya dengan melihat hasil laporan Depdiknas tahun 2006 yang menyatakan bahwa hanya baru 35,6% jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV. Sisanya, sebanyak 64,4% dari keseluruhan jumlah guru belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1 atau D-IV itu (Rismansyah, 2008).

##### **5. Kompetensi Guru sebagai Faktor penting Peningkatan Mutu Pendidikan**

Ada beberapa isu utama dalam kebijakan pendidikan nasional dewasa ini, yaitu (1) mengenai pemerataan kesempatan pendidikan, yang berarti perluasan akses pendidikan, (2) kesejahteraan guru dan dosen, (3) peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan, (4) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam pelaksanaan pendidikan, serta (5) peningkatan mutu pendidikan.

Menurut penulis, nampaknya yang menjadi core dari isu-isu tersebut adalah mengenai mutu pendidikan. Mutu pendidikan, selanjutnya dapat dilihat pada standar mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya meliputi (1) standar isi, (2)

standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan standar kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Konteks pembahasan penelitian ini pada standar pendidik dan standar kependidikan, mengingat peranan penting guru yang begitu dominan, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah mengambil strategi dengan cara meningkatkan profesionalisme guru. Untuk itu dibentuklah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Guru, sebagai salah satu bagian dari tenaga kependidikan, menurut pasal 8 UU NO.14 tahun 2005, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik adalah, guru wajib menempuh pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 atau D-IV. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah:

- (1) kompetensi pedagogik,
- (2) kompetensi kepribadian,
- (3) kompetensi profesional,
- (4) kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Demikian, Nampak jelas bahwa mutu pendidikan harus selalu didorong oleh kompetensi guru. Sebab guru adalah *key person in the classroom*, yang perannya tidak bisa digantikan. Guru adalah tokoh kunci di kelas, di mana kelas adalah tempat di mana proses pendidikan berlangsung.

#### **6. Urgensi Kemampuan *Soft skills* Guru dalam Memecahkan Persoalan Pendidikan**

Sekian lama orang menganggap bahwa keberhasilan ditentukan oleh IQ (*Intelligence Quotient*), yakni kecerdasan yang berbasiskan kepada matematika dan ilmu-ilmu eksak. Sehingga, sekian lama pula para guru mengusahakan diri dan muridnya agar cerdas secara IQ, dan berusaha mengajarkan semua pelajaran kepada para muridnya dengan metode belajar IQ pula. Semua serba matematis.

Namun, penelitian di bidang pendidikan kian berkembang. Hingga pada akhirnya Daniel Golleman (Tasmara, 2001; Agustian, 2001; Agustian, 2006; Suparno, 2004) menemukan bahwa ada jenis kecerdasan lain yang lebih menentukan tingkat keberhasilan seseorang dalam hidup, yakni kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient* (EQ). Maka, disadari bahwa IQ meskipun sangat penting, bukanlah segala-galanya. Intinya, kecerdasan seseorang tidak ditentukan oleh penalarannya saja, tetapi juga oleh kemampuannya mengelola perasaan. Kemampuan mengelola perasaan adalah kemampuan mengendalikan diri. Misalnya, tidak marah yang bukan pada tempatnya. Tidak meledak-ledak sehingga membuat keputusan yang tergesa-gesa, dan sebagainya. EQ pada gilirannya mengalirkan watak yang baik, dan integritas.

Selain itu muncul pula apa yang disebut sebagai SQ (*Spiritual Quotient*) yang diantaranya digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshall (2001). Ternyata, kemampuan emosional dan juga spiritual harus diperhatikan dalam kehidupan agar seseorang dapat berhasil.

Belakangan, Gardner (Suparno, 2004), seorang profesor pendidikan dan psikologi dari Harvard University, Amerika Serikat, yang berminat pada bidang pendidikan, cukup lama mengkritisi IQ. Menurut Gardner, dalam pengukuran IQ hanya ditekankan intelegensi matematis-logis dan linguistic, padahal ia menemukan minimal ada Sembilan intelegensi, yang kemudian dikenal sebagai *Multiple Intelligences* dalam diri seseorang. Kesembilan intelegensi itu adalah: (1) intelegensi linguistic, (2) intelegensi matematis-logis, (3) intelegensi ruang-visual, (4) intelegensi kinestetik-badani, (5) intelegensi musical, (6) intelegensi

interpersonal, (7) intelegensi intrapersonal, (8) intelegensi lingkungan, (9) intelegensi eksistensial (Suparno, 2004).

Semua intelegensi itu berperan dalam keberhasilan hidup seseorang. Itulah sebabnya orang yang ber-IQ tinggi belum tentu sukses dalam hidup. Kesembilan intelegensi itu perlu diperhatikan dalam membantu seseorang untuk berkembang dan sukses dalam hidup.

Para pakar pendidikan sepakat untuk mengatakan perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan. Artinya, untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup hanya dengan mengembangkan kecerdasan berfikir atau IQ anak didik melalui segudang ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan perilaku dan kesadaran moral. Karena hanya dengan ombinasi seperti itulah peserta didik akan mampu menghargai nilai-nilai di dalam dirinya dan orang lain. Di sinilah hakikat pendidikan sebenarnya (Sumantri, 2009).

Namun, cukup lama dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah digunakan model intelegensi yang menekankan pada logika dan matematis serta bahasa. Guru mengajarkan dengan pendekatan rasional dengan pendekatan logika dan matematika yang lebih sesuai dengan intelegensi matematis-logis, dan menjelaskan semua pelajaran maupun nilai dengan model ceramah dan cerita yang lebih sesuai dengan intelegensi linguistic. Model pendekatan itu akan menguntungkan siswa yang menonjol intelegensi matematis-logis dan linguistiknya, tetapi tidak membantu siswa siswi yang menonjol dalam intelegensi lainnya. Siswa-siswi tersebut merasa tidak dibantu dalam pembelajaran, sehingga mereka kurang maju

dalam memperdalam pengetahuan. Menurut Gardner, dalam pembelajaran siswa perlu dibantu dengan mengembangkan kesembilan intelegensi itu. Dengan kata lain, pembelajaran harus berdimensi intelegensi ganda, bukan hanya mendasarkan pada intelegensi matematis-logis dan linguistik (Suparno, 2004).

Masih dalam tilikan Suparno (2004), banyak guru mengajar sesuai dengan intelegensi yang menonjol yang ia punyai. Misalnya, kalau guru itu mempunyai intelegensi linguistic menonjol, ia akan menjelaskan semua mata pembelajaran dengan model linguistic. Kalau guru menonjol dengan intelegensi matematis logis, ia akan mengajar dengan metode lebih rasional dengan perhitungan matematis. Namun, persoalannya, intelegensi yang menonjol pada guru seringkali berbeda dengan intelegensi yang menonjol pada siswa. Maka, seringkali pengajaran guru tidak mengena dan tidak membantu siswa mengerti lebih mendalam. Secara psikologis siswa menjadi tidak senang belajar dan akhirnya malas untuk belajar (Suparno, 2003).

Dengan begitu, seorang guru sebaiknya memiliki, atau setidaknya memahami berbagai macam kecerdasan agar ia mampu mengajar semua siswa secara kreatif dan apresiatif terhadap berbagai kecenderungan kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Berbagai jenis intelegensi itu dapat ditunjukkan oleh para guru dalam berbagai kompetensi. Misalnya, untuk kecerdasan musikal dapat ditunjukkan dengan kemampuan menikmati atau menyanyikan sebuah lagu. Untuk kecerdasan kinestetik dapat ditunjukkan dengan kemampuannya dalam membuat berbagai jenis kerajinan tangan. Kompetensi, kemampuan atau berbagai keterampilan itu dalam bahasa inggris disebut *skill*. Dari sekian banyak *skill* yang dapat dilakukan

manusia berdasarkan jenis kecerdasan yang dimilikinya itu dapat dibedakan menjadi dua kategori: *hard skills* dan *soft skills*. Dalam dunia pendidikan, akhir-akhir ini banyak disebut pentingnya *soft skills* dalam keberhasilan hidup. Lalu, apa itu *soft skills* dan apa itu *hard skills*?

Tidak ada kesepakatan tunggal tentang apa itu makna *soft skills*. Tetapi secara umum, istilah ini digunakan dalam mendeskripsikan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam pekerjaan. *Soft skills* menurut yang termuat dalam Wikipedia adalah: “*the cluster of personality traits, sosial graces, facility with language, personal habits, friendliness, and optimism that mark people to varying degrees*” (www.wikipedia.com, 2011). Selanjutnya, menurut Mulay (2011), “*soft skills include concepts such as problem solving, team work and adaptability to change.*”

*Soft skills* merupakan unsur penting selain *hard skills*. *Hard skills* bersifat spesifik dan lebih mudah dilihat perwujudan kerjanya. *Hard skills* merupakan kemampuan minimum yang diperlukan karyawan untuk bekerja.

*Soft skills* merupakan kemampuan yang relatif tidak terlihat (*intangible*) tapi bisa dirasakan dan hasilnya dapat diukur. Kemampuan ini pada dasarnya merupakan wujud dari karakteristik kepribadian (*personality characteristics*) seseorang seperti: (1) motivasi, (2) sosiabilitas, (3) etos kerja, (4) kepemimpinan, (5) kreatifitas, (6) ambisi, (7) tanggung jawab, dan (8) kemampuan untuk melakukan komunikasi. Sedangkan Manullang (2010) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa *soft skills* adalah himpunan dari keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan memainkan perasaan pribadi dan keterampilan belajar.

Definisi yang lebih komprehensif, termuat dalam [www.leadingconcepts.com](http://www.leadingconcepts.com) (2011), sebagaimana dikemukakan berikut ini:

*Soft skills* are those skills that are outside a person's job description. They can include personality characteristics, including character, ethics, and attitudes. This includes interpersonal skills such as written and verbal communication, sales and presentation skills, and leadership skills. They include time and resource management skills including drive, focus, decision making, planning, execution, dealing with task overload as well as self and team evaluation and improvement

ITB (Institut Teknologi Bandung) pernah melakukan pelatihan bagi para mahasiswa baru yang dipersiapkan untuk bekerja setelah lulus. Yang dipelajari adalah area kemampuan *softskills* yang dianggap penting. Hal itu meliputi: (1) *Communication skills*, (2) *organization skills*, (3) *leadership*, (4) *effort*, (5) *group skills*, dan (6) *ethics* (Putra dan Pratiwi, 2005).

Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya *softskills* merupakan kemampuan yang diperlukan seseorang untuk mengembangkan dirinya dalam melakukan pekerjaan. Namun, untuk seorang guru, maka *soft skills* merupakan keterampilan yang sangat penting yang berkaitan dengan aspek-aspek afektif, kepribadian pro-sosial dan keterampilan produktif yang bisa terukur dalam penampilan kinerja, tugas dan tanggung jawab guru.

Kepribadian dan perilaku guru sebagai pendidik yang profesional adalah kompetensi guru yang harus dikembangkan. Salah satunya yaitu kompetensi sosial. Menurut Standar Nasional Pendidikan, yang dijelaskan berdasarkan pasal 28 ayat 3 butir (d) PP No.19 Tahun 2005, dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang (Hermansyah, 2008). Lebih jauh, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk: berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Guru seharusnya mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya, sehingga bisa berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Guru tidak saja berperan sebagai *teacher*, tetapi juga dapat berperan sebagai *loco parentis*, dimana ia mampu berperan sebagai pengganti orangtua peserta didik. Guru juga dapat melakukan suatu proses pendidikan yang didasari oleh rasa kasih sayang dan optimistis dengan cara mengefektifkan perananannya sebagai personal dan parental (Mulyana, 2001). Pernyataan Ini bisa diartikan bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian pro-sosial dan terampil dalam tindakannya sebagai seorang pendidik di dalam kelas.

Selain itu, yang juga sama-sama penting untuk dimiliki guru adalah kompetensi kepribadian. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan mengenai pasal 28 ayat 3 butir (b) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.

Kompetensi kepribadian menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana ia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

Untuk semua keperluan tersebut, guru harus memiliki *soft skills* yang baik. Karena, pada semua kompetensi yang harus dimiliki guru, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial dalam perwujudannya membutuhkan *soft skills* yang baik.

## **B. Fokus Permasalahan Studi**

### **1. Diklat PAKEM sebagai upaya peningkatan *soft skills* guru**

Semua pembahasan di atas, mengerucut kepada pemahaman bahwa kondisi pendidikan dewasa ini memiliki sejumlah persoalan yang sekaligus menjadi tantangan bagi para pelaku pendidikan untuk dapat mengatasinya. Permasalahan-permasalahan tersebut, terutama pada pendidikan di tingkat dasar dan menengah, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa fenomena berikut (Teriska, 2004).

- (1) Dari hasil berbagai ujian kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat tenaga kependidikan, menunjukkan bahwa kompetensi guru belum memadai bagi peningkatan mutu dalam proses pendidikan, yang dibuktikan dari angka rata-rata yang sangat rendah dalam wawasan pengetahuan guru dan keterampilan mengajar guru. Pelaksanaan kurikulum nasional sangat lambat, masih kurang bisa dipahami oleh para guru, sehingga adanya kurikulum muatan lokal juga belum menjawab permasalahan kebutuhan lingkungan, yang disebabkan oleh terbatasnya fasilitas sekolah, dan juga pengetahuan guru dalam menjabarkan kepentingan tersebut.
- (2) Adanya kelambanan pada penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, yang salah satunya disebabkan oleh ketidak pahaman pemerintah daerah mengenai system otonomi dan desentralisasi, disamping itu juga terjadi kelambanan pada penghapusan dikotomi sekolah swasta dan negeri

yang menimbulkan kesenjangan tingkat keberhasilan pendidikan secara umum di masyarakat.

- (3) Wawasan kebangsaan dan pembauran di bidang pendidikan yang masih perlu penanganan konsisten dan terarah, sehingga implementasi pembelajaran budi pekerti sebagai suatu nilai penting dalam pendidikan berhasil diterapkan di sekolah yang dianggap bisa berdampak langsung terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan ketiga permasalahan di atas, dan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, serta peningkatan mutu guru di Indonesia, juga mengikuti arah kebijakan pendidikan nasional, maka sebagai salah satu jawaban atas kesemua hal itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyelenggarakan diklat PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) yang dilaksanakan melalui Direktorat TK SD, sejak tahun 1997, yang waktu itu, pada tahap awal, menggunakan nama CLCC (Creating Learning Communities for Children).

PAKEM merupakan salah satu model pembelajaran yang mempunyai prinsip intervensi, yaitu: a) *suitable*, sesuai dengan program pemerintah, kebutuhan masyarakat setempat, nasional dan internasional, serta kebutuhan perkembangan teori pendidikan; b) *workable*, dapat dilaksanakan karena kesesuaiannya; c) *affordable*, terjangkau oleh sumber daya manusia dan dana yang tersedia; d) *replicable*, karena dapat diterapkan di sekolah lain sebagai pengimbasan; dan e) *sustainable*, bisa terus berlanjut karena adanya keempat prinsip sebelumnya. PAKEM mempunyai sifat demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel

dalam aspek perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi sehingga diharapkan ada perubahan yang sistemik dan lebih baik lagi (DEPDIKNAS, 2008).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, awalnya program diklat PAKEM ini bernama *Creating Learning Communities for Children (CLCC)* yang dikembangkan bersama antara pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), dan United Nations Children Fund (UNICEF). Program ini kemudian diperkenalkan pada tahun 1999, dengan sebutan yang lebih dikenal sebagai program pelatihan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Baru pada tahun 2001, atas prakarsa Bapak Fasli Jalal, diklat ini diberinama baru PAKEM, dengan muatan pelatihan Pembelajaran Aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), Peran Serta Masyarakat (PSM), dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Karena hasilnya dinilai bagus, maka PPPPTK TK dan PLB turut pula melaksanakan Diklat PAKEM ini pada tahun 2007 sampai tahun 2009 dengan sumber pembiayaan dari APBN.

Mengenai signifikansi dan urgensi diklat, merujuk kepada apa yang telah dikemukakan oleh Nucci (2006), bahwa untuk membuat suatu perubahan perilaku kepada subjek dalam pendidikan, diperlukan suatu pelatihan yang terus menerus dalam suatu lingkungan yang dikondisikan dapat mendukung terhadap perubahan nilai yang diinginkan, yaitu suatu nilai yang akan mampu merubah perilaku subjek menjadi positif seperti yang diharapkan oleh pemangku kepentingan politik dalam sistim pendidikan.

Diklat PAKEM yang diberikan kepada guru-guru kelas terutama kelas rendah di Sekolah Dasar, kepala sekolah dan sekaligus pengawas sekolah juga disusun dalam konsep yang sistematis dengan tujuan agar sistem kegiatan belajar mengajar di kelas dan di sekolah sasaran berubah menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan. Selain itu tentunya PAKEM merupakan suatu model mengajar yang akan bisa mendukung perubahan perilaku guru yang tidak efektif menjadi efektif dalam kegiatan mengajar dan diharapkan menjadi guru yang profesional dan khususnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, perubahan dengan pendekatan PAKEM ini harus didukung pula oleh Manajemen Berbasis sekolah yang baik, serta keterlibatan masyarakat yang maksimal.

Program diklat PAKEM ditujukan untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kapasitas untuk memenuhi profesionalisme yang dibutuhkan guru, sebagaimana kajian di atas adalah kompetensi *soft skills*. Dalam materi-materi yang disajikan dalam diklat PAKEM sesungguhnya banyak diajarkan mengenai *soft skills*. Bahkan, seluruh rangkaian tema sajian dalam diklat PAKEM mengandung unsur pengajaran *soft skills*. Penelitian ini akan mencari data di lapangan apakah diklat PAKEM telah sesuai dengan harapan tersebut? Bahwa diklat PAKEM merupakan diklat yang mampu meningkatkan kemampuan *soft skills* guru.

## **2. Internalisasi *Soft skills* dalam Diklat PAKEM**

Notoatmodjo (1994:27) mendefinisikan diklat sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan

intelektual dan keterampilan agar lebih produktif. Sedangkan menurut Carrel, *et al.* (1995:401), tujuan pelatihan dapat dirangkum dalam tujuh hal, sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas kerja,
- (2) Memperbarui keterampilan pegawai (*update employee skills*),
- (3) Menghindarkan penerapan manajerial yang telah usang (*avoid managerial obsolescence*),
- (4) Memecahkan masalah organisasi,
- (5) Memberikan bekal pelatihan kepada karyawan baru sebagai orientasi,
- (6) Mempersiapkan karyawan yang akan dipromosikan, serta untuk pengelolaan suksesi kepemimpinan (*managerial succession*),
- (7) Memenuhi kebutuhan pertumbuhan karyawan (*satisfy personal growth needs*).

Selanjutnya, seeluruh materi dalam diklat PAKEM mengandung unsur pengasahan *soft skills* bagi para peserta. Untuk menjawab tantangan tidak optimalnya kapasitas yang harus dimiliki guru dalam dunia pendidikan di Indonesia, internalisasi nilai-nilai *soft skills* dirasakan sangat penting untuk diupayakan. Lantas apa itu internalisasi? Kata internalisasi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Inggris "*internalization*". Kata ini memiliki akar kata "*intern*" yang berarti "dalam" (Wojowasito, 1980:86). "*Internal*" berarti "yang bersifat atau berkaitan dengan dalam" yaitu antonim dari kata "*external*".

Etimologi *internalization* atau internalisasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses usaha untuk menjadikan sesuatu berada di dalam. Dalam konteks pendidikan, internalisasi nilai dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan

nilai berada di dalam diri manusia. Sedangkan menurut Burhani (t.t) internalisasi mempunyai arti “pendalaman, penghayatan atau pengasingan”. Adapun internalisasi secara praktis menurut Syihabuddin (2007) adalah bagaimana “memprabadikan” sebuah model ke dalam tahapan praktis pembinaan atau pendidikan.

Dengan demikian, diklat PAKEM merupakan diklat yang disiapkan untuk menginternalisasikan suatu nilai. Karena belakangan ini banyak dibicarakan mengenai pentingnya *soft skills* bagi peningkatan kualitas kerja, maka penelitian ini diarahkan pada seberapa jauh proses internalisasi nilai *soft skills* ini melalui diklat PAKEM.

### **3. *Soft skills* Guru dan Diklat PAKEM dalam Peningkatan Mutu Pendidikan**

Defenisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam bergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa latin “*Qualis*” yang berarti *what kind of* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan (Usman, 2006 : 407).

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik),

metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Dari sisi guru, mutu dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu memfasilitasi proses belajar siswa. Setiap tenaga pengajar memiliki tanggung jawab terhadap tingkat keberhasilan siswa belajar dan keberhasilan guru mengajar. Sementara itu dari sudut kurikulum dan bahan belajar mutu dapat dilihat dari seberapa luwes dan relevan kurikulum dan bahan belajar mampu menyediakan aneka stimulasi dan fasilitas belajar secara berdiversifikasi. Dari aspek iklim pembelajaran, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan.

Sedangkan Departemen pendidikan nasional, Direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah (Dit.Dikdasmen) menyatakan bahwa Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berperoses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu

apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusannya dan merasa puas (Usman, 2006 : 410).

Mutu dalam konteks manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TQM) bukan hanya merupakan suatu gagasan, melainkan suatu filosofi dan metodologi dalam membantu lembaga untuk mengelola perubahan secara totalitas dan sistematis, melalui perubahan nilai, visi, misi, dan tujuan (Tjiptono dan Diana, 1995). Karena itu dalam dunia pendidikan mutu lulusan suatu sekolah dinilai berdasarkan kesesuaian kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Masalah-masalah di dalam kelas sebagai akibat rendahnya kualitas guru dalam menghadapi siswa, serta kondisi kelas yang tidak kondusif dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terdiri dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kompetensi guru seperti diuraikan di atas. Peneliti telah mengadakan beberapa kali observasi awal ke sekolah-sekolah (SD), dan mendapatkan bahwa disamping kurang menyenangkan suasana kelas bagi siswa, para guru tidak memahami cara menghadapi anak.

Maka salah satu alternatif solusinya adalah dengan memberikan diklat PAKEM dan menyampaikan konten diklat yang paling penting, yaitu mengasah kompetensi guru, sehingga diharapkan *soft skills* mereka meningkat.

Untuk itu, melalui diklat PAKEM, paling sedikit para guru ini diberikan bimbingan dan pengetahuan bagaimana seharusnya memahami praktek pengasuhan anak atau *parenting*. Bagaimana siswa harus disiplin, mengajarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku yang dihubungkan dengan nilai

moral yang lebih dalam, dan implikasinya dalam hubungan sosial mereka. Misalnya, bagaimana para siswa siswi bisa diberi tantangan untuk berpikir kritis dengan cara berbicara santun sekaligus, sesering mungkin dengan orang dewasa. Guru dalam hal ini harus mempunyai keyakinan bahwa mereka menanam benih yang bisa dikembangkan lebih baik dan membentuk masa depan siswa seperti yang digaris bawahi dalam tujuan pendidikan nasional.

Penelitian ini akan secara fokus membahas, sejauh mana diklat PAKEM dapat menginternalisasikan *soft skills* kepada para pesertanya, di mana *soft skills* ini secara teoretis mendorong peningkatan mutu pendidikan secara signifikan, berdasarkan penjelasan di atas.

### **C. *Soft skills* dan Diklat PAKEM sebagai Wilayah Kajian Pendidikan**

Secara filosofis, orang-orang Yunani, lebih kurang 600 tahun sebelum Masehi, telah menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha membantu manusia menjadi manusia (Tafsir, 2008). Maksudnya, manusia itu pada dasarnya memiliki banyak potensi. Tetapi agar berkembang, potensi itu harus digali terlebih dahulu. Sehingga para guru, sebetulnya bukan mencetak potensi murid, melainkan membantu murid menemukan potensi yang pada dasarnya setiap orang memilikinya. Ini merupakan paradigma pendidikan yang penting: mendidik adalah menumbuhkan, bukan mencetak. Menumbuhkan kecenderungan potensi yang pada dasarnya telah dimiliki anak.

Secara lebih praktis, kemudian pendidikan banyak didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari

tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak pandai menjadi pandai. Oleh karena itu proses pendidikan pasti memiliki tujuan. Berbagai Negara memiliki tujuan khusus masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan memerlukan pula metode. Sebab metode adalah cara untuk menempuh suatu tujuan. Tujuan dan metode bisa saja berubah sesuai waktu dan tempat. Perubahan itu didorong oleh kebutuhan yang berbeda menurut konteksnya masing-masing. Untuk menentukan metode yang tepat bagi suatu tujuan tertentu dibutuhkan sebuah kajian yang mendalam berupa penelitian.

Menurut penulis, *soft skills* merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan yang diharapkan tentu saja pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang bermutu, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Metode untuk menanamkan *soft skills* salah satunya dengan melalui diklat. Sebagaimana teori Nucci (2006) yang telah disebutkan di atas. Diantara diklat yang pernah diselenggarakan dalam sejarah pendidikan di Indonesia adalah diklat PAKEM.

Untuk itu, diperlukan penelusuran lebih jauh lagi secara ilmiah mengenai apakah betul bahwa *soft skills* berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang diharapkan? Apakah diklat PAKEM yang pernah diselenggarakan berpengaruh terhadap peningkatan *soft skills* para peserta. Dengan demikian, maka *soft skills* dan diklat PAKEM ini merupakan bagian penting yang harus dikaji dalam wilayah pendidikan. Semua itu memerlukan bukti dan kajian yang ilmiah melalui penelitian ilmiah.

Secara konseptual maupun praktis, manusia merupakan fokus perhatian dalam kajian pendidikan umum. Demikian pula, cara-cara mengenai bagaimana manusia

dapat tumbuh dan mengembangkan diri serta cara-cara mengarahkan manusia agar dapat hidup lebih baik merupakan topic sentral dalam pendidikan umum. Kemudian, untuk apa manusia itu dibimbing dan diarahkan, juga menjadi pusat perhatian pendidikan umum (Mulyana, 2001).

Dalam dinamika perkembangan kepribadian manusia yang berbeda antara satu manusia dengan yang lainnya, telah terjadi apa yang disebut Jung sebagai proses individualisasi –arah perkembangan menuju pada suatu kemajuan yang stabil (Hall dan Linzey, 1985: 132). Proses ini berlangsung dalam proses menjadi (*becoming*) untuk menentukan keberadaan dan kebermaknaan hidup (*being*). Namun demikian, ketercapaian kesatuan pada diri manusia, menurut Allport (1964: 376), hanyalah berkenaan dengan persoalan tingkat (*degree*); karena manusia selalu mengalami proses menjadi yang terus menerus dan tak pernah tuntas.

Dalam wilayah praksis, pelaksanaan pendidikan umum berurusan dengan cara-cara memberikan pembinaan terhadap pribadi-pribadi manusia agar hidup sehat, matang, produktif, dan beriman. Pribadi manusia diarahkan agar memiliki kesadaran diri, kepekaan lingkungan, dan kebermaknaan (Mulyana, 2001).

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan itu, pendidikan dapat berwujud dalam berbagai bentuk program. Salah satu di antaranya adalah dalam bentuk Diklat. Diklat adalah konsep pelaksanaan pendidikan yang khas. Sebagai sebuah bentuk program pendidikan diklat diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam hal ini, diklat yang dimaksud adalah diklat PAKEM, disampaikan untuk tujuan menginternalisasikan *soft skills* kepada para peserta pelatihan tersebut, yakni insan-insan pendidikan. Mereka adalah pengawas, kepala sekolah, dan terutama para guru. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yakni *soft skills*, PAKEM, dan mutu pendidikan, kemudian hubungan diantara ketiganya.

Hal-hal mengenai itu selanjutnya harus dianalisis secara ilmiah melalui teori ilmu pendidikan. Teori ilmu pendidikan ialah teori yang rasional dan empiris tentang pendidikan. Melalui kajian yang seperti ini, maka semua kajian ini abash untuk disebut sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Karena ilmu pendidikan berisi teori-teori rasional ditunjang dengan bukti-bukti empiris (Tafsir, 2008:6).

Selanjutnya, sebagaimana yang pernah diulas oleh Sudjana dan Ibrahim (1989), bahwa secara umum fungsi penelitian pendidikan adalah: (1) untuk pengembangan ilmu pendidikan, (2) pemecahan masalah pendidikan, (3) untuk meneliti kebijakan pendidikan, dan (4) dapat menunjang pembangunan. Sementara Hadjar (1996) mengemukakan cirri-ciri penelitian pendidikan sebagai sesuatu yang (1) objektif, (2) tepat, (3) verifikatif, (4) menerangkan, (5) empiris, (6) logis, dan (7) probabilitas.

Maka dari itu, penelitian mengenai *soft skills* dan PAKEM adalah bagian dari wilayah penelitian pendidikan, karena dalam prosesnya, penelitian ini mengikuti koridor-koridor tersebut, baik fungsi maupun ciri-cirinya.

#### **D. Pentingnya Penelitian *Soft skills* dan Diklat PAKEM dalam Peningkatan Mutu Pendidikan**

Para tenaga kependidikan secara terus menerus telah berusaha memahami proses pendidikan karena mereka harus membuat keputusan secara profesional dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu mereka memerlukan pengetahuan kependidikan sebagai dasar atas segala tindakannya. Pengetahuan yang berisi informasi tentang pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dalam mendapatkan pengetahuan pendidikan itu, para tenaga kependidikan, juga manusia pada umumnya, mengandalkan beberapa sumber, di antaranya pengalaman pribadi, pendapat ahli, tradisi, intuisi, penalaran, dll.

Selain itu, cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yaitu dengan penelitian. Pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian semakin banyak digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, terutama di Negara-negara maju (McMillan dan Schumacher, 1989). Sebagai sumber pengetahuan, penelitian dianggap lebih baik daripada sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Hal ini karena pengetahuan yang diperoleh dari penelitian didasarkan pada kenyataan yang dideskripsikan dan diukur secara sistematis.

Dalam bidang pendidikan, terdapat penelitian yang lebih memfokuskan untuk mendapatkan informasi tentang praktik kependidikan tertentu seperti pembelajaran, program, dan sekolah. Dalam hal ini, penelitian dalam karya ilmiah ini mengenai *soft skills*, diklat PAKEM, dan Mutu Pendidikan. Serta hubungan signifikansi di antara ketiganya. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat

digunakan secara langsung dalam membuat perencanaan, pengembangan, peningkatan praktek tertentu, dalam hal ini diklat, serta untuk penggunaan yang lebih luas. Penelitian ini juga diharapkan membuahakan peningkatan praktek diklat yang memiliki dasar pijakan yang teruji secara empiris dan objektif.

#### **E. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk poin-poin pertanyaan, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah para peserta yang telah mengikuti diklat PAKEM memiliki *soft skills*?
- 2) Apakah diklat PAKEM berpengaruh terhadap peningkatan *soft skills* para peserta?
- 3) Apakah kemampuan *soft skills* guru dan Diklat PAKEM berpengaruh terhadap mutu pendidikan?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui *soft skills* para peserta yang telah mengikuti diklat PAKEM.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh diklat PAKEM terhadap peningkatan *soft skills* para peserta diklat.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan *soft skills* para peserta dan Diklat PAKEM terhadap mutu pendidikan.

Penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi dalam tiga hal berikut:

Pertama, manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini berupa analitis deskriptif mengenai Diklat PAKEM yang bermuatan untuk menginternalisasikan kemampuan *soft skills* yang dapat melengkapi serta mengembangkan teori dalam pengembangan Diklat PAKEM yang sudah ada.

Kedua, manfaat bagi Direktorat TK SD dan PPPPTK TK PLB, sebagai penyelenggara. Hasil penelitian ini bermanfaat guna memperkaya landasan teoritis penyelenggaraan Diklat PAKEM yang sudah diselenggarakan oleh Direktorat TK SD dan PPPPTK TK PLB dan dapat menawarkan konsep Diklat alternatif sebagai pengembangan dalam diklat PAKEM, dalam rangka meningkatkan kompetensi *soft skill* guru.

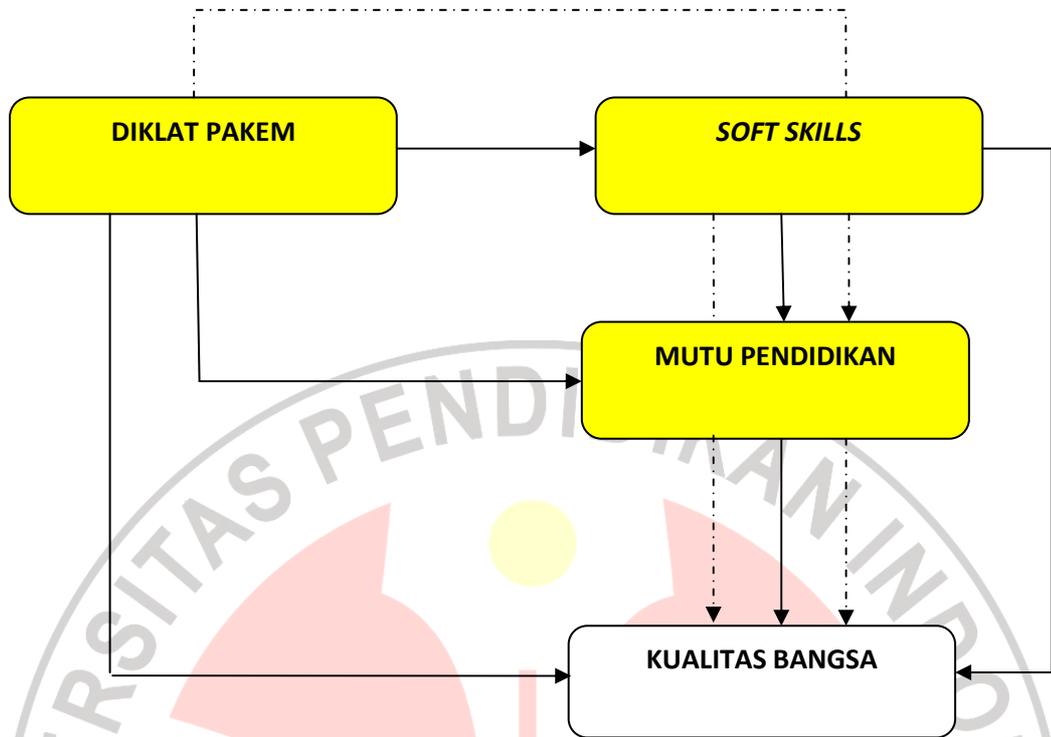
Ketiga, manfaat untuk masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, berupa materi, metode, pendekatan, dan model diklat PAKEM yang bermuatan internalisasi kemampuan *soft skills* dalam rangka meningkatkan kompetensi *soft skill* guru dalam tugas kesehariannya di sekolah, di mana latar belakang guru yang mengajar di sekolah ini sangat bervariasi dan dengan kompetensi yang –sebagian besar- belum memadai.

### **G. Asumsi Penelitian**

Asumsi dalam penelitian ini adalah, bahwa jika *soft skills* para guru yang pernah mengikuti diklat PAKEM semakin baik, maka itu artinya diklat PAKEM memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan *soft skills* guru. Oleh karena

itu, diklat PAKEM dapat pula dikatakan sebagai memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan (melalui internalisasi *soft skills* para guru), karena salah satu indikator pendidikan yang bermutu adalah memiliki guru yang profesional yang ditandai dengan kemampuan *soft skills* yang dimilikinya, yang itu mereka dapatkan salah satunya melalui diklat PAKEM. Sehingga, diklat PAKEM dan *soft skills* memberikan pengaruh positif terhadap mutu pendidikan, baik secara langsung maupun tidak. Bahkan, lebih luas dari itu, sebagaimana yang telah diuraikan panjang lebar dalam sub bab sebelumnya, bahwa mutu pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas bangsa. Oleh karena itu, diklat PAKEM dan *soft skills* yang telah mendorong peningkatan mutu pendidikan, dapat dikatakan secara tidak langsung turut meningkatkan kualitas bangsa. Dan karena dalam diklat PAKEM maupun *soft skills* intinya pembangunan karakter, maka keduanya ini pun memberi pengaruh secara langsung terhadap kualitas bangsa.

Untuk lebih mudah memahaminya, asumsi penelitian ini dapat dilihat dari gambar model berikut keterangannya, sebagaimana di bawah ini.



**Bagan 1.2**  
**Asumsi Penelitian**

**Keterangan gambar:**

1. Tanda panah menunjukkan pengaruh
2. Tanda panah dengan garis tegas menunjukkan pengaruh langsung
3. Tanda panah dengan garis putus-putus menunjukkan pengaruh tidak langsung.
4. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini hanya yang tertera dalam kotak berwarna kuning.

## H. Paradigma Konseptual Penelitian

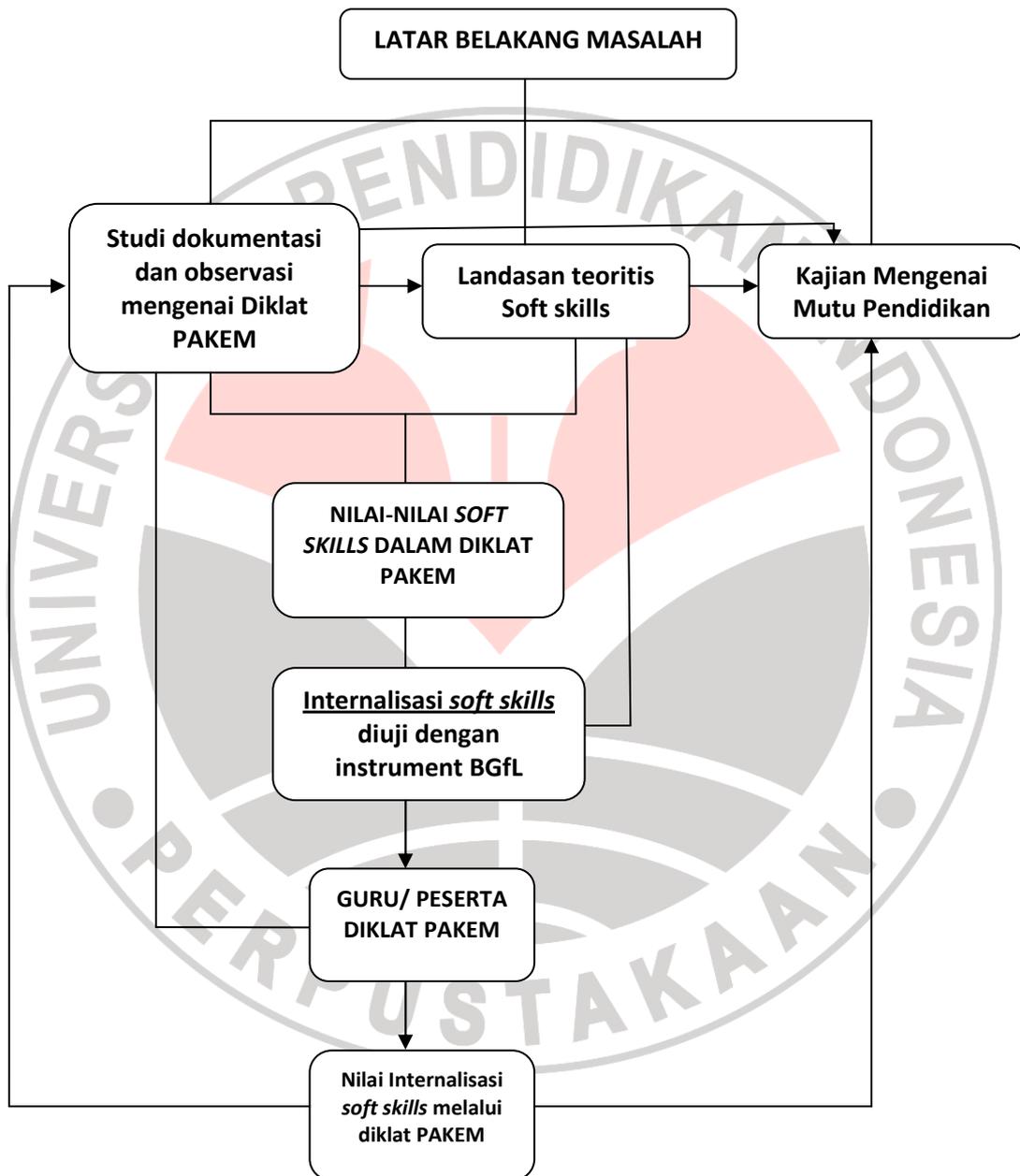
Setelah mengkaji latar belakang permasalahan, hingga mengerucut kepada perumusan masalah, diketahui bahwa ada dua variabel yang layak dikaji berdasarkan latar belakang penelitian. Pertama, *soft skills*, dan kedua, diklat PAKEM.

Diklat PAKEM, karena ini merupakan kegiatan pelatihan yang sudah banyak terdokumentasikan, maka bisa ditelusuri data-datanya melalui studi dokumentasi dan observasi mengenai apa dan bagaimana Diklat PAKEM itu. Sedangkan mengenai *soft skills*, ini merupakan suatu peristilahan baru yang mengungkapkan mengenai kepribadian manusia, seperti halnya bisa dicari melalui studi teoretis terhadap konsep-konsep yang terkait dengannya, semisal IQ, EQ, SQ, MI, dst.

Diklat PAKEM diselenggarakan untuk *up grading* kapasitas guru. Dalam hal ini kapasitas *soft skills* guru. Sementara *soft skills* termuat dalam seluruh rangkaian materi diklat PAKEM. Selanjutnya *Soft skills* akan diukur dengan menggunakan instrument BGfL, yang sesungguhnya merupakan alat ukur bagi kecerdasan ganda seseorang. Namun, dalam penelitian ini, BGfL akan dijustifikasi agar bisa juga digunakan untuk mengukur *soft skills*. Karena menurut hemat peneliti, nilai-nilai *soft skills* merupakan wujud keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan ganda. Sehingga, bisa digunakan alat ukur yang sama.

Setelah itu, barulah diukur mengenai pengaruh diklat PAKEM dan kemampuan *soft skills* guru terhadap mutu pendidikan.

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana yang diharapkan, paradigma konseptual penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



**Bagan 1.1**  
**Paradigma Konseptual Penelitian**

## **I. Hipotesis**

Hipotesis merupakan titik awal untuk melakukan analisis dan interpretasi atas gejala-gejala yang tampak dari hasil uji hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

1. Para peserta yang telah mengikuti diklat PAKEM memiliki *soft skills* berupa intrapersonal skills, kinestetik skills, linguistic skills, interpersonal skills, musical skills, logic/mathematic skills, natural skills, dan visual skills.
2. Diklat PAKEM berpengaruh positif terhadap peningkatan *soft skills* para peserta.
3. Kemampuan *soft skills* peserta dan Diklat PAKEM berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan.

## **J. Metode Penelitian**

Ukuran untuk sebuah aktifitas pendidikan berupa diklat adalah mengenai efektifitasnya. Creemers (2010: 120-121) menuliskan bahwa untuk melakukan penilaian efektifitas pendidikan, maka para peneliti melakukan penelitian efektifitas pendidikan (EER) yang sangat esensial dan penting dalam mengilustrasikan kekuatan dan kelemahan aspek-aspek pada bidang pendidikan dengan metodologi yang dianggap paling mutakhir dan mempunyai implikasi pada efektifitas pendidikan berbasis ilmu pengetahuan.

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui perilaku guru dan implikasinya, kurikulum, prosedur pengelompokan siswa, organisasi sekolah, kebijaksanaan pendidikan yang sangat kompleks dalam efektivitas pendidikan. Selanjutnya Creemers (2010) menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan dalam EER, adalah mengidentifikasi dan menginvestigasi faktor-faktor dalam pengajaran (*teaching*), kurikulum dan lingkungan belajar seperti ruang kelas, sekolah dan tingkatan yang lebih tinggi dari sekolah yang baik, langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan dengan mengukur perbedaan-perbedaan (variasi) melalui hasil belajar siswa (*students outcomes*).

Pendeknya, Creemers (1996: 21) mendefinisikan efektivitas dengan *means-ends relationship between educational processes and student outcomes*. Sedangkan Arikonto (1988: 8) mengaitkan efektivitas dengan hasil pengukuran hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan suatu program.

Creemers (1996: 48-55) menawarkan suatu model komprehensif efektivitas pendidikan (*comprehensive model of educational effectiveness*), yang mencakup level siswa, kelas, sekolah dan terakhir level konteks. Keempat level ini dapat disarikan sebagai berikut:

- (1) Level siswa; Prestasi siswa akan banyak dipengaruhi, antara lain, oleh latar belakang, motivasi dan bakat siswa yang bersangkutan. Selain tiga hal tersebut, faktor yang juga ikut mempengaruhi prestasi siswa adalah kondisi sekolah dan kelas di mana siswa yang bersangkutan berada. Untuk itu, pengembangan sekolah, yang berorientasi pada peningkatan prestasi

belajar siswa, harus dapat menentukan dan menangani secara tepat faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

(2) Level kelas; Kondisi kelas yang disebutkan sebelumnya adalah termasuk dalam faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ada tiga komponen yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam pengembangan kelas:

- Kualitas pengajaran dalam kelas; kualitas pengajaran ini ditentukan antara lain oleh: kejelasan dan keberurutan tujuan dan isi pelajaran, struktur dan kejelasan isi pengajaran, penggunaan media pengajaran yang baik, penggunaan materi untuk evaluasi hasil belajar siswa, *feedback* dan *corrective instruction*.
- Kurikulum; misalnya mengenai penggunaan *text book* dan materi oleh guru.
- Prosedur pengelompokkan dan tingkah laku guru; yang dimaksud dengan pengelompokkan adalah kemampuan guru dalam melihat perkembangan siswa, sehingga ia dapat menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkannya.

(3) Level sekolah; terdapat dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan pada level sekolah ini, yaitu iklim yang tumbuh dan mekanisme evaluasi hasil belajar siswa. Iklim lebih merupakan suatu kondisi dimana proses belajar mengajar terjadi. Iklim yang baik berarti bahwa sekolah tersebut memiliki kondisi di mana para siswa dan guru dapat berinteraksi dengan optimal untuk mencapai sasaran pembelajaran.

Sedangkan mekanisme evaluasi hasil belajar merupakan kebijakan yang diambil oleh pimpinan sekolah untuk mengukur seberapa jauh hasil belajar para siswa.

- (4) Level konteks; yang termasuk dalam level konteks ini adalah: a) kualitas, yang antara lain berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sekolah, ketersediaan sistem indikator atau kebijakan nasional mengenai sistem evaluasi/pengujian; b) waktu, misalnya mengenai jadwal sekolah yang berlaku dan ditetapkan secara nasional, dan c) kesempatan belajar, seperti petunjuk secara nasional mengenai pengembangan kurikulum, *school working plan*, rencana aktivitas pada level sekolah (Creemers, 1996:50-55).

Penelitian tentang pendidikan mungkin setara usia pendidikan itu sendiri. Telah begitu banyak penelitian yang dilakukan untuk lebih memahami hakikat pendidikan. Jumlah hasil penelitian yang telah dipublikasikan akan sulit untuk dihitung, karena begitu banyak yang telah dilaporkan, dan begitu kompleksnya dunia pendidikan, sehingga selalu memunculkan hal-hal baru yang menantang para peneliti untuk lebih memahami tentang hal-hal baru tersebut.

Kalau tadi disebutkan bahwa usia penelitian pendidikan adalah setara usia pendidikan itu sendiri, maka penelitian yang khusus mengangkat isu efektivitas pendidikan atau sekolah baru dimulai sekitar 20 tahun yang lalu (Creemers, 1996:38). Riddell dan Brown (1991: 2), menyebutkan secara lebih eksplisit bahwa penelitian efektivitas sekolah telah dimulai sekitar akhir tahun 70-an dan di awal tahun 80-an. Scheerens (Towsend, 1994: 2) menyebutkan bahwa terdapat 4

kategori penelitian yang mengangkat isu tentang efektivitas sekolah, yaitu pertama, penelitian yang meneliti tentang *equality of educational outcomes*, kedua adalah riset yang meneliti *educational production functions*, ketiga adalah penelitian yang mengeksplorasi sekolah-sekolah yang dianggap efektif (*effective schools research*), dan terakhir adalah riset yang hanya meneliti tentang efektivitas pengajaran (*instructional effectiveness*).

Selanjutnya, Townsend (1994: 33-34) menyebutkan terdapat empat dimensi yang penting untuk membangun pemahaman yang tepat mengenai suatu pendidikan –dalam hal ini sekolah- yang efektif. Pertama, yang merupakan dimensi paling penting, adalah memahami efektivitas sekolah, baik secara konsep maupun praktis. Yang kedua, adalah aspek teknik metodologis yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu sekolah untuk dapat dikatakan atau dikategorikan efektif. Dimensi ketiga adalah cara mengukur tujuan-tujuan (*goals*) dari suatu sekolah untuk dapat dikatakan efektif. Ketiga dimensi tersebut, secara bersama-sama, dapat digunakan untuk menggeneralisasikan suatu model atau kerangka untuk memahami bagaimana mengenali atau mengidentifikasi sekolah-sekolah yang efektif. Dan dimensi terakhir, yang keempat, adalah berhubungan dengan proses-proses yang terjadi di sekolah yang menjadikan sekolah tersebut efektif dalam praktik.

Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil diklat PAKEM sebagai model yang diteliti dengan pendekatan EER. Sehingga paradigma di atas kami terapkan untuk meneliti mengenai diklat PAKEM ini dalam kaitannya dengan pengembangan *soft skills* para peserta yang pernah mengikuti diklat ini.

Diklat PAKEM telah terbukti diselenggarakan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia, dan telah dilaksanakan selama lebih dari satu dekade sejak 1998 sampai sekarang. EER menurut Cramers (2010) merupakan suatu metodologi penelitian untuk mengukur efek jangka panjang dari adanya guru dan sekolah. Oleh karena itu peneliti meneliti pula implementasi PAKEM sebagai suatu model yang digunakan oleh guru di sekolah dasar yang diteliti, karena guru dapat mengakibatkan efek kritis terhadap seluruh siswa yang diajarnya dalam waktu jangka panjang.

Untuk kebutuhan mengikuti alur paradigma atau model penelitian EER semacam di atas, secara teknis, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi korelasi yang merupakan jenis dari penelitian deskriptif dan metode penelitian *ex post facto*.

Studi korelasi dalam penelitian deskriptif adalah studi yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan variabel-variabel dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Korelasi dapat menghasilkan dan menguji suatu hipotesis mengenai hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antar kedua variabel. Studi yang bertujuan untuk menguji hipotesis, peneliti menduga dan mengharapkan terdapat korelasi dari variabel-variabel yang ditelitinya. Hipotesis yang diuji didasarkan dari teori yang telah ada (Sudjana dan Ibrahim, 1989:77).

Sedangkan *ex post facto* artinya sesudah fakta. *Ex post facto* sebagai metode penelitian menunjuk kepada perlakuan atau manipulasi variabel bebas X telah

terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memberikan perlakuan lagi, tinggal melihat efeknya pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, peneliti tinggal memilih subjek yang telah mendapat perlakuan atau manipulasi variabel bebas X sebelumnya, kemudian mengukur efek variabel bebas tersebut pada variabel terikat tertentu. Dengan demikian, penelitian *ex post facto* dapat mengkaji hubungan dua variabel bebas atau lebih dalam waktu yang bersamaan untuk menentukan efek variabel bebas tersebut pada variabel terikat (Sudjana dan Ibrahim, 1989: 57).

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian *ex post facto* dan penelitian deskriptif (Sudjana dan Ibrahim, 1989: 65; Hadjar, 1996 ) adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan masalah
- 2) Menentukan jenis informasi yang diperlukan
- 3) Menentukan prosedur pengumpulan data
- 4) Menentukan prosedur pengolahan data
- 5) Menarik kesimpulan

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Meskipun, dalam penafsiran makna-makna kuantitatif tersebut peneliti menggunakan pula data-data kualitatif. Maka dari itu, dalam penelitian ini sebetulnya dapat disebut *mixing method*, yakni pemaduan antara data kuantitatif dan kualitatif. Namun yang menjadi kecenderungan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas, pertama-tama peneliti akan memaparkan secara komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan *soft skills*. Penjelasan mengenai hal ini didapatkan dari berbagai literatur yang membahas teori-teori mengenai *soft skills*. Seluas mungkin akan digambarkan berbagai informasi dan kajian mengenai *soft skills*?

Setelah itu akan diuraikan pembahasan mengenai diklat PAKEM. Penjelasan dimulai dari sejarah penyelenggaraan diklat PAKEM, filosofi yang mendasarinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hingga keseluruhan muatan penyelenggaraannya. Informasi dan kajian mengenai hal ini didapatkan dari studi atas dokumen-dokumen penyelenggaraan diklat PAKEM. Kemudian mencari korelasi, apakah di dalam diklat PAKEM itu memuat beberapa nilai *soft skills* yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada dua kajian di atas, tentu saja melalui pendekatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti akan melakukan pengumpulan data kuantitatif dari sejumlah sampel yang pernah mengikuti diklat PAKEM, dan mencari jawaban atas beberapa rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Apakah para guru yang pernah memperoleh diklat PAKEM ini merasa terdorong dalam mengembangkan kemampuan *soft skills*-nya. Apakah hasil diklat PAKEM itu dapat diterapkan di sekolah tempat para guru tersebut mengajar? jika tidak, apa kendala-kendalanya?

Dengan demikian, maka prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa alat pengumpul data berupa (1) studi kepustakaan, (2) observasi, (3) instrument, (4) catatan lapangan, (5) wawancara tidak terstruktur.

Sedangkan prosedur pengolahan data yang digunakan adalah tehnik analisa kuantitatif dengan menggunakan softwre program Lisrel yang merupakan bagian dari program untuk analisa SEM. Mengenai hal ini lebih lanjut akan ditemukan pembahasannya dalam Bab III.

### **K. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian**

Penting kiranya dikemukakan di sini, bahwa jumlah guru di seluruh Indonesia mencapai kurang lebih 2.700.000 orang. Sedangkan jumlah guru SD mencapai 1.300.000 orang. Namun, subjek dalam penelitian ini adalah para guru, kepala sekolah, dan pengawas tingkat Sekolah Dasar di berbagai daerah provinsi yang telah mengikuti diklat PAKEM yang diselenggarakan oleh Direktorat TK SD sejak tahun 2001, dan diklat PAKEM yang diselenggarakan oleh PPPPTK TK PLB pada tahun 2007 sampai 2009. Jumlah mereka mencapai 1.080 orang, yang tersebar di berbagai wilayah provinsi Jawa Barat, Bangka Belitung, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo dan Sulawesi Selatan, Aceh, Bali, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta (guru, kepala sekolah, dan pengawas pada tingkat sekolah dasar) yang pernah mengikuti diklat PAKEM yang diselenggarakan oleh Direktorat TK SD sejak tahun 2001, dan yang diselenggarakan oleh PPPPTK TK PLB pada tahun 2007 sampai 2009 adalah sebanyak 1.080 orang.

Dalam penelitian ini, populasinya bisa dikatakan homogen, bahwa mereka semua adalah pengawas, kepala sekolah, dan guru SD yang telah mengikuti diklat

PAKEM yang diselenggarakan oleh dua lembaga yang telah disebut di atas. Sehingga, teknik sampling yang akan digunakan adalah probability sampling dengan cara simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi tersebut. Sebab, hal ini absah dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogeny (Riduwan dan Akdon, 2009: 241).

Untuk itu, dalam menentukan besarnya sampel, maka peneliti mengacu pada pendapat Surakhmad yang dikutip oleh Narbuko dan Achmadi (2004: 110), apabila populasi cukup homogen (serba sama), terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, dan jika di atas 100, diambil sebesar 10-15%. Hal ini juga setara dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:120) bahwa: “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 – 15%, atau 20 – 25% atau lebih, ...”.

Dengan pertimbangan itu peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 223 orang, dimana angka ini adalah sejumlah 20,6% dari seluruh jumlah populasi yang ada.